

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Stakeholder Theory

Dalam konteks teori stakeholder, artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder nya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan. Hadi (dalam Arik, 2013) menyatakan bahwa Stakeholder merupakan semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”. Pada awalnya yang dimaksud dengan pemangku kepentingan mencakup para pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas.

(Ismail, 2009:48) Pengertian teori stakeholder menurut Freeman,1984 (dalam Fauziyatur Rohmah 2013) adalah sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Teori ini juga menyatakan perusahaan akan memilih secara sukarela dalam pengungkapan informasi kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka. Tujuan utamanya adalah membantu manajer korporasi untuk mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan dilingkungan perusahaan mereka serta

menolong manajemen korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi stakeholdernya.

Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder, makin baik pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba. Penggunaan teori stakeholder dalam penelitian ini sangat lah tepat dalam mengukur kinerja keuangan daerah dimana rasio rasio yang akan digunakan sangatlah berkaitan dengan informasi publikasi dari badan pemerintah tepatnya oleh badan pusat statistik dimana indikator-indikator yang diperlukan akan dimuat pada pada website resmi pemerintah.

2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata-mata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di panti-panti sosial. Padahal esensi pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan “pemberdayaan” masyarakat melalui pemberian modal usaha,

penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain-lain. Kesejahteraan masyarakat di bidang sosial pada dasarnya merupakan keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan hakekat dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik.

Menurut Mosher (2007), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa di ukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*)

2.2.1 Prinsip dan Faktor Kesejahteraan Masyarakat

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
3. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang

lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

2.2.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut BPS (2015) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Pengertian keluarga sejahtera menurut UU No 2002 merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Kesejahteraan keluarga akan tercapai apabila keluarga memiliki ketahanan yang kuat.

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara yang mencakup tiga hal mendasar yaitu: 1) lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir 2) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan 3) standar hidup yang diukur dengan konsumsi perkapita. Nilai indeks pembangunan manusia berkisar antara 0-100.

Indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, menengah dan ke jenjang perguruan tinggi), dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/penghasilan/PPP). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang untuk menilai kemajuan manusia serta serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indikator indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik tercermin melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index (PPP). Indeks pembangunan manusia mengukur pencapaian Resolunchal/" dari suatu daerah/negara. Tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran perkapita (BPS, 2007).

2.3.1. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan Tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2. Indeks Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya. Mendapatkan informasi orang yang: meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan 3 P)

Kemampuan daya beli penduduk atau purchasing power parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam

menghitung indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang dikenal dengan pendapatan perkapita. Untuk mengukur standard hidup layak, data PDRB perkapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, perhitungan daya beli penduduk menggunakan konsumsi perkapita yang kemudian disesuaikan. Setelah dilakukan perhitungan pengeluaran perkapita setahun yang disesuaikan, selanjutnya dilakukan perhitungan indeks pendapatan. Indeks pendapatan menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat, oleh karena itu semakin tinggi indeks pendapatan maka semakin tinggi daya beli perkapita penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli secara implisit menunjukkan kenaikan kesejahteraan melalui kenaikan pendapatan dan stabilitas harga, sehingga pada akhirnya mutu pembangunan manusia meningkat. Konsep tersebut lebih mengasumsikan bahwa kenaikan indeks daya beli atau kenaikan pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan sejalan dengan kenaikan pendapatan absolut dan pendapatan riil. Meskipun demikian, suatu hal yang ekstrim bisa saja terjadi, dimana kenaikan pengeluaran riil perkapita lebih disebabkan oleh insentif stabilisasi inflasi, sehingga kemungkinan kenaikan pendapatan absolut sebenarnya riil tidak terjadi (Maqin,2007)

Merujuk pada ketiga indikator indeks pembangunan manusia, maka angka indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS,

2004):

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Ket: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPD (Indeks Pendidikan)

IHH (Indeks Harapan Hidup)

IP (Indeks Pendapatan/Daya Beli)

2.4 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25). Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu kemampuan structural organisasinya, kemampuan aparatur Pemerint Daerah, Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah (Ibnu Syamsi, 1986: 99).

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya,

jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4. Kemampuan keuangan Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.4.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban dari suatu daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Khusaini (2018: 2) “Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Selanjutnya, dijelaskan dalam Amin (2019: 4) bahwa: Hak merupakan hak pemerintah daerah untuk mencari dan menetapkan sumber pendapatan daerah berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber lain pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban pemerintah daerah untuk membelanjakan atau menengluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah berarti hak dan kewajiban

suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam periode yang telah ditentukan dan semua hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2016):

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014). Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk :

1. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.4.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah adalah kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran, yang dimana pengukurannya dalam penelitian mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio. Yang dimana pengukurannya dengan menilai dari kinerja keuangan APBD. Dalam buku karangan Mahmudi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2010) analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah yang secara umum dinilai dari besar kecilnya antara realisasi pendapatan dan anggarannya. Salah satu indikator kinerja dapat dikatakan baik apabila realisasi melampaui anggaran atau target yang telah ditentukan. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dikatakan baik tidak hanya melihat realisasi pendapatan keuangan telah melampaui target anggaran atau belum, tetapi juga melihat komponen pendapatan lain yang lebih berpengaruh.

Berdasarkan realisasi anggaran, kita dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara :

a. Analisis varians pendapatan daerah.

Cara ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan dana yang dianggarkan. Hasil selisih anggaran tersebut berguna untuk memberikan informasi bagi pengguna dalam menganalisis kinerja pendapatan. Anggaran pendapatan adalah target minimal yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Dimana Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah target anggaran yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan atau dapat dikatakan tidak mencapai target anggaran, maka hal itu dinilai kurang baik bahkan dapat dikatakan buruk.

b. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah

Cara ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan dana yang dianggarkan. Hasil selisih anggaran tersebut berguna untuk memberikan informasi bagi pengguna dalam menganalisis kinerja pendapatan. Anggaran pendapatan adalah target minimal yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Dimana Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah target anggaran yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan atau dapat dikatakan tidak mencapai target anggaran, maka hal itu dinilai kurang baik bahkan dapat dikatakan buruk.

2. Analisis Rasio Keuangan

Untuk analisis rasio keuangan sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam rasio yang ada, namun dalam penelitian ini ada 4 rasio, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan.

2.5 Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara tertib, dimana pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Tingkat partisipasi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, maka menggambarkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, adanya penunggakan pembayaran pajak oleh masyarakat atau wajib pajak menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga merasa keberatan dalam membayarkan pajak. Tetapi hal tersebut hanya secara umum dan tidak sepenuhnya terjadi demikian, penunggakan pembayaran pajak juga bisa disebabkan oleh faktor lainnya, seperti kurangnya sosialisasi, susahnya sistem pembayaran pajak yang ada dan lainnya. Rasio kemandirian dapat diperoleh dengan membagi pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer.

Hal tersebut bertujuan untuk membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa pendapatan asli daerah menjadi patokan dari kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli Daerah yang akan dibagi atau dibandingkan dengan komponen lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah.

2.6 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan terdiri dari presentase pertumbuhan PAD dan presentase pertumbuhan total pendapatan. Rasio pertumbuhan merupakan hasil perhitungan yang diperoleh dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai pada periode

sebelumnya untuk dapat dipertahankan maupun ditingkatkan pada periode berikutnya

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

2.7 Rasio Keserasian Belanja

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja Total Realisasi Belanja Daerah dan Total Realisasi Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dana besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Analisis keserasian belanja ini merupakan salah satu usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia dalam mengukur

efektivitas pelaksanaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peneliti menggunakan perhitungan rasio analisis keserasian belanja yang terdiri dari rasio keserasian belanja operasi terhadap total belanja. Belanja operasi terdiri dari realisasi atas belanja pelayanan publik dan total belanja daerah.

2.8 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Suyana Utama, 2008:27). Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Mahsun, 2006:187).

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1.	Aceng Abdul Hamid, 2018	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap	Variabel Independen :	Kinerja keuangan daerah berupa

		Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat	-Rasio Kemandirian -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi -Rasio Keserasian Belanja Variabel Independen : -Kesejahteraan Masyarakat	kemandirian daerah, efisiensi, efektifitas dan keserasian belanja keuangan pemerintah daerah secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka berupa Pendapatan Perkapita dengan nilai koefisien determinasi sebesar (R Square) 84,5%.
2.	Khairudin et al, 2020	Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan	Variabel Independen : -Rasio Kemandirian -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi	Penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteran

		masyarakat di indonesia	-Rasio Pertumbuhan Variabel Dependen : -Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik (2) kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah
--	--	-------------------------	--	---

				memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
3.	Enggar Kartika Cahyaning, et al, 2022	Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Variabel Independen : -Rasio Pertumbuhan -Rasio Efektivitas -Rasio Efisiensi Variabel Dependen : -Kesejahteraan Masyarakat	Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu Rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hipotesis kedua yaitu rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hipotesis ketiga yaitu rasio efisiensi

				berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4.	R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, et all, 2022	Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Variabel Independen : -Rasio Kemandirian -Rasio Pertumbuhan Variabel Dependen : -Kesejahteraan Masyarakat	Hasil dari penelitian ini secara ringkas terbagi kedalam dua pokok bahasan, yaitu mengenai rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung memiliki angka yang sangat tinggi dengan rata – rata rasio kemandirian

				<p>keuangan sebesar 74,16% pada tahun anggaran 2016 hingga 2021. Tingginya rasio kemandirian keuangan tersebut berpengaruh pada pola hubungan keuangan yang diterapkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bandung.</p>
5.	Adhi Dhian Fajar Sakti, et al, 2022	<p>Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening</p>	<p>Variabel Independen : -Rasio Kemandirian -Rasio Efisiensi -Rasio Pertumbuhan</p> <p>Variabel Dependen : -Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan berupa: Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di</p>

				<p>Jawa Tengah periode tahun 2018–2021, Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah periode tahun 2018–2021, Rasio pertumbuhan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah periode tahun 2018–2021, Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah periode tahun</p>
--	--	--	--	---

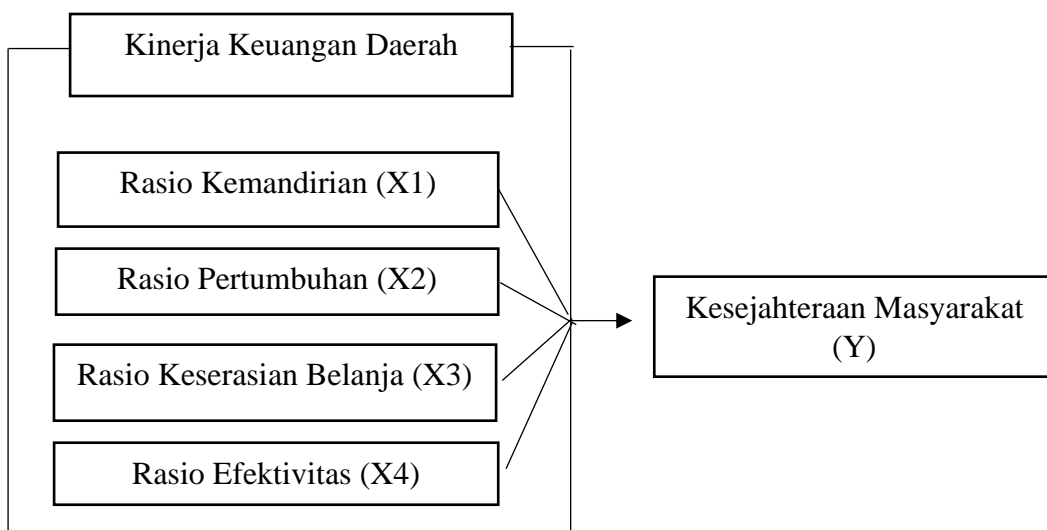
				<p>2018–2021, Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah baik melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, Rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, Rasio pertumbuhan daerah tidak</p>
--	--	--	--	---

				berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.
--	--	--	--	--

2.10 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan rasio yang menunjukkan sejauhmana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menjelaskan tingkat kemampuan pada daerah tertentu saat menganggarkan kegiatan pemerintah, pelayanan dan pembangunan ke masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang digunakan pada daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah didapatkan dari pembagian antara PAD yang dibagi dengan total pendapatan transfer yang diterima daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Hasil pembagian tersebut selanjutnya disajikan dalam besaran persentase.

Peneliti (Sakti, 2023) menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel rasio kemandirian terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.11.2 Pengaruh Rasio Pertumbuhan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rasio pertumbuhan keuangan daerah adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan maupun belanja secara positif maupun negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi

mana yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan keuangan daerah terdiri atas 4 indikator, yaitu rasio pertumbuhan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja operasi.

Peneliti (Maulia, 2022) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh antara variabel rasio pertumbuhan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.11.3 Pengaruh Rasio Keserasian Belanja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja Total Realisasi Belanja Daerah dan Total Realisasi Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dana besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Peneliti (Maulia, 2022) menyatakan bahwa rasio keserasian belanja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh antara variabel rasio keserasian belanja terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.11.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen

Peneliti (Maulia, 2022) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh antara variabel rasio efektivitas terhadap kesejahteraan masyarakat.